## RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2024 DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN /		ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	RENCANA AKSI	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB			Laksanaan Iwulan ke-		KET	
	SUB KEGIAIAN			AKAN DISELESAIKAN)				1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	·	Belum optimalnya penataan dan penyediaan kawasan permukiman yang layak huni di luar atau di dalam kawasan								
$\vdash$	Kawasan Permukiman	Presentase pengurangan Kawasan Kumuh	89,36	kumuh								
	Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen									
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	Beluma adanya penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualilas perumahan kumuh dan permukiman kumuh kota padang panjang sebagai dokumen rencana aksi penaganan dan pencegahan permukiman kumuh kota	Penyusuna dokomen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh (RP2KPKPK)	98.709.750	Kepala Bidang Perumahan Permukirnan					
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan									
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	Adanya potensi berkembangnya kawasan kumuh baru perkotaan, sehingga diperlukan penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan	Melakukan koordinasi dalam rangka pengurangan dan penanganan kawasan kumuh Kota Padang	36.912.150	Kepala Bidang Perumahan Permukiman					
	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24		Panjana							
	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan									
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	Belum optimalnya pemeliharaan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berupa jalan lingkungan, bangunan pengaman dan saluran drainase	Melakukan perbaikan terhadap kerusakan dan pemeliharaan sarana permukiman yang telah ada	6.221.473.543	Kepala Bidang Perumahan Permukiman					
	Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%									

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena reloksi program pemerintah	4 unit			men disebut di dida katala kalika kalika di diga Antala Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel Angel				
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	Belum terfasilitasinya kebutuhan rehab rumah masyarakat yang terkena bencana	Melakukan perbaikan rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana	44.960.050	Kepala Bidang Perumahan Permukiman			
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	Belum terfasilitasinya kebutuhan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Melakukan pembangunan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota	59.999.950	Kepala Bidang Perumahan Permukiman			
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen							
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	Masih adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap Rumah Layak huni	Pemanfaatan hunian rusunawa untuk masyarakat yang membutuhkan	457.593.736	Kepala Bidang Perumahan Permukiman			
2 Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85%	Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup						
Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%							
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen							
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen	Diperlukannya penyediaan dokumen KLHS RPJMD sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.	Penyusunan dan penetapan dokumen KLHS RPJMD	122.623.600	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	diperlukannya penyediaan dokumen KLHS RDTR untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program pada dokumen RDTR	Penyusunan KLHS RDTR	144.841.000	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan	100%							
Pencegahan Pencernaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis							
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	Perlunanya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup	Koordinasi dengan Kabupaten perbatasan dan pemerintah Propinsi Sumbar	16.010.100	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			

.

.

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Belum tersusunnya Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca		Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	Perlunya pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara sebagai sumber data menghitung nilai kualitas air dan udara	Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air sungai, air bersih, limbah, air hujan dan udara secara laboratoris	380.963.773	Kepala UPTD Laboratorium LH			
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis							
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	Perlunya disampaikan informasi kualitas lingkungan kepada Masyarakat	Pelaksanaan Sosialisasi kualitas lingkungan dan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaku usaha/kegiatan	18.126.250	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23%							
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan		*					
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	Perlunya pengelolaan Ruang Terbuka hijau Publik	Mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik	2.048.429.850	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	Belum Maksimalnya SDM dalam mengelola Keanekaragaman Hayati	Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati melalui Pelatihan	28.116.400	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%							
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali							
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	Perlunya memastikan pelaksanaan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha/kegiatan	Pembinaan Pelaku usaha/kegiatan untuk pemenuhan komitmen	6.433.400	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina / diverifikasi lapangan	24							
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan		Masih belum maksimalnya pengelolaan LB3 oleh fasyankes	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 terhadap fasyankes	14.530.500	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%							

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabunatan/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%							
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 Iaporan	Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan yang dimiliki	Melakukan penegakan hukum lingkungan berupa sanksi administrasi bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat	23.585.300	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH (pendataan, pendampingan)	50%							
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	- 1 dokumen							
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 dokumen	Belum adanya koordinasi dan sinkronisasi tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan untuk menindaklanjuti penyediaan data LPPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	19.999.850	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			*
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%							
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan							
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	Belum optimalnya publikasi kegiatan sosialisasi dan gerakan peduli lingkungan hidup terhadap masyarakat	Pendampingan Gerakan peduli lingkungan Hidup	30.000.000	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	Masih Rendahnya Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyebaran Informasi kepada masyarakat melalui media cetak dan radio maupun sosialisasi secara langsung	10.000.000	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	183,999,950	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis							
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok							

Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerja	1 kelompo	Belum Optimalnya Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) yang mengintegrasikan aspek-aspek Prilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH)	Pendampingan dan Pembinaan Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) menuju penghargaan Adiwiyata	93.362.600	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	1009							W
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumer							
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumer	pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup	menerima, memverikasi, menganalisis dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/pencemaran lingkungan hidup	11.103.350	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumer	adanya potensi sengketa lingkungan hidup akibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang harus diselesaikan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan	memfasilitasi dan memediasi sengketa lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Dinas Perkim LH Kota Padang Panjang	8.619.950	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup			
Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%							
Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	80%							elliller se langustusse and pideling scangesion
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampal	Belum Maksimalnya peran Kelompok Masyarakat dalam melalukan Pengelolaan Sampah	Melaksanakan pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah bagi kelompok masyarakat	40.000.000	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			en Sindiana de la Comunity de Le com
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumer	Belum terdokumentasikan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi serta mendokumentasikannya	9.150.000	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			Melakukan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA	6.508.403.081	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			
Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	sampah	Pemenuhan Sarana dan Prasana pengangan sampah dan pembayaran gaji petugas kebersihan	5.807.179.590	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3 dan Pengendalian Pencemaran			

3 Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan	Persentase permukiman layak huni	98,80%	Belum terpenuhinya				Т	Т	
permukiman			ketersediaan rumah layak						
			huni						
Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase permukiman layak huni	96,62%						$\exists$	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha								gara Artista kini sa Angara da Agara ay da da da
Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha			Masih adanya kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap Rumah Layak huni yang berada di dalam dan di luar pada kawasan kumuh	2.561.117.300	Kepala Bidang Perumahan Permukiman				

Padang Panjang, Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NIP. 19750825 200212 1 004